

ABSTRAK

JUDUL TESIS: POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

NAMA MAHASISWA: MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA

NIM: 207161012

KATA KUNCI: POLITIK HUKUM, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini semakin pesat dan telah merambat ke seluruh bidang kehidupan manusia. Kini, segala pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien berkat bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun di balik segala kemudahan yang diberikan, terdapat sebuah potensi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Terdapat ancaman yang nyata terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Sampai saat ini belum ada aturan setingkat undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Padahal, data pribadi atau privasi seseorang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Untuk itu, penyusunan dan pengesahan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi harus segera dilaksanakan, agar dapat memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam penyusunannya, pemerintah dapat mencontoh Negara Malaysia yang telah mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi (*Personal Data Protection Ac*) sejak 2010 lalu.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian utama. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dan deskriptif analitis. Metode deskriptif komparatif, memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum diatur di dalam berbagai sistem hukum, dalam hal ini adalah sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Sedangkan deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa: *pertama*, politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia telah tercermin di dalam undang-undang yang sudah ada sebelumnya, mulai dari undang-undang tentang pokok kearsipan, undang-undang kesehatan, undang-undang praktik kedokteran, sampai kepada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, Kementerian Informasi dan

Komunikasi juga telah menerbitkan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi di Dalam Sistem Elektronik. Namun, aturan-aturan yang sudah ada dirasa kurang memadai dan belum bisa memenuhi kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Pengaturan setingkat undang-undang sangat diperlukan karena perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh Negara. Politik hukum perlindungan data pribadi di Malaysia tercermin di dalam *Personal Data Protection Act* yang disahkan pada 2010 lalu. *Kedua*, bentuk perlindungan data pribadi di Indonesia dapat melibatkan antara dua pihak, yakni pemerintah dan pelaku bisnis dalam menetapkan pengaturan dan perlindungan. Pemerintah juga dapat mencontoh Negara Malaysia yang sudah memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

ABSTRACT

THESIS TITLE: PERSONAL DATA PROTECTION's POLITIC OF LAWS IN INDONESIA

STUDENT NAME: MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA

NIM: 207161012

KEY WORDS: POLITIC OF LAW, PERSONAL DATA PROTECTION

The development of Information and Communication Technology (ICT) has grown rapidly and spread into every aspects of human life. Now, all human work has become more effective and efficient because of the help of Information and Communication Technology. But, with all benefits given by ICT, there is a potential loss experienced by Indonesian people. There's a real threat to Indonesian people personal data. Until now, there's no specific law that regulates about personal data protection. Whereas personal data is a part of Human Rights that has to be protected by The Government as stated in Constitution. Therefore, the drafting and legalization to the specific regulation that rule about personal data protection need to be done in order to fulfill people's need and to protect people's interest. In its drafting progress, the Government could follow Malaysia, the country that already had specific law that rule and protect personal data (PDPA) since 2010.

This study used normative juridical method. The study used normative juridical approach to legal research done by searching library materials or secondary data as primary research material. The comparative descriptive method provides a descriptive illustration of how a rule of law is regulated in various legal systems, in this case the legal system of Indonesia and Malaysia. While analytic description study is intended to provide data as thoroughly as possible about human, circumstance, and other symptoms in society.

Based on the results of the research, it can be concluded that: firstly, politics of law of personal data protection law in Indonesia has been reflected in existing laws, such as: primary archive laws, health laws, medical practice laws, and information and electronic transactions laws. In addition, the Ministry of Information and Communications has also issued a Ministerial Regulation on the Protection of Personal Data in Electronic Systems. However, existing rules are perceived as inadequate and have not been able to meet the need for protection of personal data. The new law is indispensable because the protection of personal data is a part of Human Rights that must be protected by the State. The politics of law of personal data protection law in Malaysia has been reflected in Personal Data Protection Act that has been ruled in Malaysia since 2010. Secondly, the form of personal data

protection in Indonesia can involve between two parties, namely the government and business actors in setting up and protecting personal data. The government can also follow the example of Malaysia which already has specific laws governing the protection of personal data.